P-ISSN 2963-1653
E-ISSN 2829-4084

Open Acces: https://ejournal.staialutsmani.ac.id/itish

I'thisom Jurnal Ekonomi Syariah

Penyaluran ZIS–DSKL, Kemiskinan, dan Moderasi SPBE: Analisis Data Panel Sepuluh Provinsi di Indonesia

Fitoyo Pambudi [1], Nirdukita Ratnawati [2]

[1,2] Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

Email : fitoyopambudi@gmail.com[1], nirdukita.ratnawati@trisakti.ac.id[2]

Abstract : This study analyzes the relationship between the distribution of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Other Religious Social Funds (ZIS–DSKL) on poverty levels across ten provinces in Indonesia from 2019 to 2025, with the Electronic-Based Government System (SPBE) Index as a moderating variable. The Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, Open Unemployment Rate (OUR), and inflation are used as control variables. This research employs panel data (70 observations) analyzed using the Random Effect Model (REM). The results indicate that ZIS–DSKL distribution and SPBE do not have a significant direct effect on poverty. However, the interaction variable (ZIS–DSKL × SPBE) is significant with a positive coefficient. This indicates that the marginal effect of ZIS–DSKL on poverty is conditional upon the SPBE level, and within the observed sample range, higher SPBE shifts the marginal effect of ZIS–DSKL to be positive, indicating it does not strengthen the poverty-reducing effect. Among the control variables, only GRDP per capita has a significant negative effect, while HDI, OUR, and inflation are insignificant. This study concludes that the effectiveness of ZIS–DSKL in reducing poverty heavily depends on the quality of digital governance integration (SPBE) with the zakat management system. Integrated mustahik data between local governments and amil zakat institutions is required. This finding is associative in nature and limited by the purposive sample of ten provinces.

Abstrak : Penelitian ini menganalisis hubungan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS–DSKL) terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi di Indonesia periode 2019–2025, dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai variabel moderasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan inflasi digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian

ARTICLE HISTORY
Received: 10 Juli 2026
Accepted: 15 September 2026
Published: 31 Oktober 2026

KEY WORDS
Islamic Social Finance; kemiskinan; SPBE; ZIS–DSKL

ini menggunakan data panel (70 observasi) yang dianalisis dengan *Random Effect Model* (REM). Hasil menunjukkan bahwa penyaluran ZIS–DSKL dan SPBE tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kemiskinan. Namun, variabel interaksi (ZIS–DSKL × SPBE) signifikan dengan koefisien positif. Ini mengindikasikan bahwa efek marginal ZIS–DSKL terhadap kemiskinan bersifat kondisional bergantung pada level SPBE, dan pada rentang observasi sampel, peningkatan SPBE justru mengubah arah efek marginal ZIS–DSKL menjadi positif, sehingga belum mampu memperkuat penurunan kemiskinan. Dari variabel kontrol, hanya PDRB per kapita yang signifikan negatif, sedangkan IPM, TPT, dan inflasi tidak signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas ZIS–DSKL dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas integrasi tata kelola digital (SPBE) dengan sistem pengelolaan zakat. Diperlukan integrasi data mustahik yang terpadu antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat. Temuan ini bersifat asosiatif dan dibatasi oleh sampel *purposive* sepuluh provinsi.

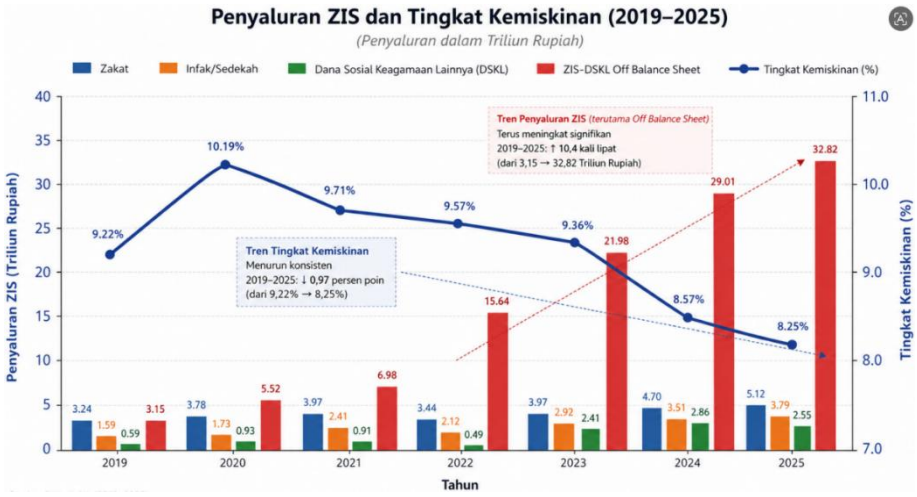
Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan yang paling kompleks di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja menyebabkan jutaan penduduk masih hidup dalam kondisi rentan (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, termasuk melalui penguatan instrumen redistribusi kekayaan berbasis masyarakat.

Dalam konteks ekonomi Islam, *Islamic Social Finance* (ISF) memiliki peran strategis dalam mekanisme redistribusi kekayaan. Instrumen seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai *social safety net* dan instrumen pemberdayaan ekonomi (Hidayati et al., 2024). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi penghimpunan ZIS-DSKL yang sangat besar. Apabila dikelola secara profesional dan produktif, dana ini mampu

mentransformasi mustahik menjadi muzakki, sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan (Efendi, 2024; Zuchroh, 2025).

Namun demikian, data empiris menunjukkan adanya anomali antara peningkatan penyaluran ZIS-DSKL dengan penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BAZNAS dan BPS, penyaluran dana ISF mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, komponen ZIS-DSKL *Off Balance Sheet* meningkat drastis dari sekitar Rp3,15 triliun pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp32,82 triliun pada tahun 2025. Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional memang menunjukkan tren penurunan, tetapi lajunya relatif lambat, yaitu dari 9,22% pada 2019 menjadi 8,25% pada 2025. Fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. Perbandingan Perkembangan Islamic Social Finance dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019–2025

(Sumber: BAZNAS dan Badan Pusat Statistik, diolah)

Kesenjangan antara lonjakan dana ZIS-DSKL dan penurunan kemiskinan yang lambat mengindikasikan bahwa besarnya dana tidak secara otomatis menjamin efektivitas penyaluran. Persoalan utama terletak pada kualitas tata kelola, ketepatan sasaran (*targeting accuracy*), dan integrasi data penerima manfaat (World Bank, 2024). Di sinilah peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi krusial. SPBE tidak hanya berfungsi sebagai digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai ekosistem tata kelola digital yang mampu mengintegrasikan data sosial-ekonomi, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi koordinasi antarlembaga (Kementerian PANRB, 2024; OECD, 2023). Dengan tata kelola digital yang baik, penyaluran ZIS-DSKL dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Berdasarkan telaah literatur, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *Islamic Social Finance* masih berfokus pada pengaruh langsung

zakat terhadap kesejahteraan mustahik pada level mikro (Beik & Arsyianti, 2016). Sementara itu, penelitian mengenai SPBE lebih banyak mengkaji aspek efisiensi birokrasi dan pelayanan publik, belum banyak yang menguji perannya sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara ZIS-DSKL dan kemiskinan. Untuk mengisi kesenjangan tersebut (*variable gap*), penelitian ini mengajukan tiga hipotesis: (H1) ZIS-DSKL berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; (H2) SPBE berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; dan (H3) SPBE memoderasi (memperkuat) pengaruh negatif ZIS-DSKL terhadap kemiskinan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi perspektif Ekonomi Syariah dan *Digital Governance* menggunakan analisis data panel di 10 provinsi di Indonesia, sehingga mampu memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai sinergi antara filantropi Islam dan transformasi digital pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara *Islamic Social Finance* (ISF), yang diproksikan melalui penyaluran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS–DSKL), terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diposisikan sebagai variabel moderasi, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan inflasi sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel (gabungan *cross-section* 10 provinsi dan *time-series* 2019–2025), sehingga menghasilkan 70 observasi *balanced panel*. Mengingat data yang digunakan bersifat observasional dan diestimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM), penelitian ini tidak bertujuan membuktikan kausalitas absolut, melainkan menganalisis hubungan asosiatif dan pengaruh antarvariabel (Wooldridge, J.M, 2022). Data sekunder bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Populasi penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* (Sugiyono, 2023) dengan kriteria utama: (1) ketersediaan data penyaluran ZIS–DSKL tingkat provinsi yang lengkap dari BAZNAS selama periode 2019–2025; (2) ketersediaan data makroekonomi (kemiskinan, IPM, PDRB per kapita, TPT, Inflasi) dari BPS; dan (3) ketersediaan Indeks SPBE dari Kementerian PANRB. Berdasarkan kriteria kelengkapan data tersebut, terpilih 10 provinsi yang memiliki data panel seimbang (*balanced panel*). Pemilihan 10 provinsi ini menyiratkan adanya potensi *selection bias*, sehingga hasil

penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh provinsi di Indonesia, melainkan memberikan gambaran empiris pada wilayah yang memiliki ekosistem data ZIS-DSKL dan SPBE yang memadai.

Tabel 1. Daftar Provinsi Sampel Berdasarkan Ketersediaan Data (2019–2025)

No	Provinsi	Ketersediaan Data (ZIS-DSKL, Kemiskinan, Makroekonomi, SPBE)	Karakteristik Utama
1	Aceh	Lengkap (7 Tahun)	Kelembagaan zakat unik karena dikelola oleh Baitul Mal sebagai bagian dari pemerintahan daerah (Makraja et al., 2025).
2	Sumatera Barat	Lengkap (7 Tahun)	Memiliki budaya filantropi Islam yang kuat dan implementasi zakat produktif yang berkembang (BAZNAS, 2024).
3	DKI Jakarta	Lengkap (7 Tahun)	Pusat penghimpunan zakat nasional dengan digitalisasi pengelolaan paling maju, meskipun kemiskinan relatif rendah (BAZNAS, 2024; BPS, 2025).
4	Jawa Barat	Lengkap (7 Tahun)	Populasi terbesar di Indonesia sehingga potensi penghimpunan zakat paling besar dan layanan digital berkembang pesat (BAZNAS, 2024).
5	Jawa Tengah	Lengkap (7 Tahun)	Jumlah mustahik dan penyaluran zakat besar dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibanding provinsi lain di Jawa (BPS, 2025).
6	DI Yogyakarta	Lengkap (7 Tahun)	Memiliki IPM tertinggi, namun tingkat

			kemiskinan masih relatif tinggi, memungkinkan analisis kontras (BPS, 2025).
7	Jawa Timur	Lengkap (7 Tahun)	Kontributor terbesar PDRB nasional dengan jaringan BAZNAS dan LAZ yang luas (BPS, 2025).
8	Nusa Tenggara Barat	Lengkap (7 Tahun)	Tingkat kemiskinan tinggi dengan ZIS yang terus berkembang; sering menjadi lokasi studi efektivitas zakat (Nuraila, et al, 2026)
9	Kalimantan Timur	Lengkap (7 Tahun)	Kinerja penghimpunan zakat relatif baik sehingga mewakili karakteristik wilayah Kalimantan (BAZNAS, 2024).
10	Sulawesi Selatan	Lengkap (7 Tahun)	Pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur dengan digitalisasi zakat yang terus meningkat (BAZNAS, 2024).

Sumber: Diolah dari publikasi BAZNAS (2025), BPS (2025), dan Kementerian PANRB (2024).

Penelitian ini menggunakan empat kelompok variabel. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan). Variabel independen adalah penyaluran ZIS–DSKL (dalam satuan Rupiah) yang ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln_ZIS) untuk mengurangi *skewness* (Gujarati & Porter, 2009). Variabel moderasi adalah Indeks SPBE (skala 1–5). Variabel kontrol meliputi IPM, PDRB per kapita (Ln_PDRB), TPT, dan Inflasi. Untuk menguji hipotesis, digunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan model data panel sebagai berikut:

$$Kemiskinan_{it} = \beta0 + \beta1\ Ln_ZIS_{it} + \beta2\ SPBE_{it} + \beta3\ (Ln_ZIS_{it} \times SPBE_{it}) + \beta4\ IPM_{it} + \beta5\ Ln_PDRB_{it} + \beta6\ TPT_{it} + \beta7\ Inflasi_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

- i = Provinsi (1, 2, ..., 10)
- t = Tahun (2019, 2020, ..., 2025)
- u_i = Efek acak spesifik provinsi (*unobserved heterogeneity*)
- ε_it = Komponen *error* (galat)

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Tahapan analisis meliputi: (1) Statistik deskriptif untuk melihat sebaran data; (2) Pemilihan model regresi data panel (Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*) untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), atau *Random Effect* (REM) (Baltagi, 2021); dan (3) Pengujian hipotesis melalui Uji t (parsial), Uji F (simultan), dan Koefisien Determinasi (Adjusted R^2). Karena model terpilih adalah REM yang diestimasi dengan *Generalized Least Squares* (GLS), pengujian asumsi klasik OLS tidak dilakukan secara kaku, karena GLS telah mengakomodasi heterogenitas varians dan struktur galat (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, J.M, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Statistik Deskriptif

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian selama periode 2019–2025 (N = 70 observasi). Hasil analisis menggunakan perangkat lunak EViews 13 disajikan pada Tabel 2. Perlu dicatat bahwa variabel penyaluran ZIS–DSKL (LZIS) dan PDRB per kapita (LPDRB) telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk mengurangi *skewness* dan perbedaan skala data, dengan memastikan tidak terdapat nilai nol pada data asli penyaluran.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N=70)

Statistik	Kemiskinan (%)	LZIS (Ln Rupiah)	SPBE (Indeks 1-5)	IPM (Indeks)	LPDRB (Ln Rupiah)	TPT (%)	Inflasi (%)
Mean	9.192	5.688	3.491	75.726	11.081	5.561	2.807
Median	9.145	5.397	3.395	74.675	10.860	5.675	2.375
Maximum	15.530	8.748	4.790	85.050	12.815	10.950	7.430
Minimum	3.420	3.410	2.050	68.140	10.134	2.730	0.600
Std. Dev.	3.251	1.250	0.692	3.756	0.727	1.701	1.611

(Sumber: Hasil olahan EViews 13, 2025)

Berdasarkan Tabel 2, variabel tingkat kemiskinan memiliki rata-rata 9,19% dengan rentang 3,42% hingga 15,53%. Simpangan baku sebesar 3,25

mengindikasikan adanya variasi antarprovinsi dan antarperiode. Variabel LZIS memiliki rata-rata 5,688 dengan simpangan baku 1,250, menunjukkan variasi kapasitas penyaluran dana antarprovinsi. Variabel SPBE memiliki rata-rata 3,491 pada skala 1–5, dengan nilai minimum 2,05 dan maksimum 4,79, yang menggambarkan adanya perbedaan tingkat kematangan tata kelola digital pemerintahan antarprovinsi berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB.

Variabel IPM memiliki rata-rata 75,73 (kategori tinggi) dengan simpangan baku 3,756. Variabel LPDRB memiliki rata-rata 11,081 dengan simpangan baku 0,727. Variabel TPT memiliki rata-rata 5,56% (min 2,73%; max 10,95%), dan variabel Inflasi memiliki rata-rata 2,81% dengan nilai maksimum mencapai 7,43% pada periode tertentu, yang menunjukkan adanya fluktuasi harga yang perlu dikendalikan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya heterogenitas karakteristik antarprovinsi. Oleh karena itu, penggunaan analisis data panel dinilai tepat untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah (*cross-section heterogeneity*) sekaligus dinamika perubahan dari waktu ke waktu (*time-series variation*).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Berdasarkan hasil pengujian (Tabel 3), Uji Chow menunjukkan FEM lebih baik dari CEM (p = 0,0000), sedangkan Uji Hausman menunjukkan REM lebih tepat dari FEM (p = 0,8477). Uji LM juga mengonfirmasi REM lebih baik dari CEM (p = 0,0000). Dengan demikian, *Random Effect Model* (REM) dipilih sebagai model estimasi utama dalam penelitian ini.

Tabel 3. Ringkasan Pemilihan Model Data Panel

Pengujian	Statistik / Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	Prob. Cross-section F = 0,0000	FEM
Uji Hausman	Prob. Cross-section Random = 0,8477	REM
Uji Lagrange Multiplier	Prob. Breusch-Pagan = 0,0000	REM

Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Hasil estimasi model regresi data panel dengan pendekatan REM disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	45.4748	7.9457	5.7232	0.0000
LZIS	-0.0786	0.2744	-0.2863	0.7756
SPBE	-0.1336	0.1884	-0.7087	0.4812
LZIS × SPBE	0.3134	0.0943	3.3229	0.0015
IPM	-0.0518	0.0656	-0.7900	0.4326
LPDRB	-2.9562	0.8977	-3.2929	0.0016
TPT	0.2097	0.1051	1.9945	0.0505
Inflasi	0.0155	0.0448	0.3458	0.7307
Adjusted R^2	0.6103			
Prob (F-statistic)	0.0000			

(Sumber: Hasil olahan EViews 13, 2025)

Berdasarkan Tabel 4, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0000 (< 0,05), yang berarti secara simultan minimal terdapat satu variabel independen yang berasosiasi signifikan dengan tingkat kemiskinan. Nilai *Adjusted* R^2 (Weighted Statistics) sebesar 0,6103 menunjukkan bahwa sekitar 61,03% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model.

Uji Parsial dan Interpretasi Efek Moderasi (Krusial!) Berbeda dengan model regresi tanpa interaksi, keberadaan variabel interaksi (LZIS × SPBE) yang signifikan (p = 0,0015) mengubah cara interpretasi. Koefisien LZIS (-0,0786) dan SPBE (-0,1336) tidak dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh universal, melainkan pengaruh bersyarat (efek utama pada saat variabel lainnya bernilai nol). Karena nilai SPBE empiris berkisar antara 2,05 hingga 4,79 (tidak pernah nol), interpretasi harus berfokus pada Efek Marginal.

Efek marginal penyaluran ZIS terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$$\partial \text{Kemiskinan} / \partial \text{LZIS} = \beta 1 + \beta 3(\text{SPBE}) = -0{,}0786 + 0{,}3134(\text{SPBE})$$

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada rentang nilai SPBE yang diamati (2,05 – 4,79), estimasi efek marginal LZIS terhadap kemiskinan bernilai positif. Ini berarti peningkatan penyaluran ZIS justru cenderung meningkatkan kemiskinan pada level SPBE tersebut.

2. Koefisien interaksi yang positif (0,3134) mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat implementasi SPBE, pengaruh penyaluran ZIS dalam menurunkan kemiskinan justru semakin melemah (atau bergeser ke arah positif). Hal ini tidak mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan SPBE memperkuat efek negatif ZIS terhadap kemiskinan.
3. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan pada α=5% adalah LPDRB (p = 0,0016, negatif). Sedangkan TPT (p = 0,0505) secara statistik tidak signifikan pada taraf 5% (meskipun marginal pada 10%), serta IPM dan Inflasi tidak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Penyaluran ZIS-DSKL terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi *Random Effect Model* (REM) menunjukkan koefisien LZIS sebesar -0,0786 dengan probabilitas 0,7756. Koefisien negatif menunjukkan kecenderungan penurunan kemiskinan, namun tidak signifikan secara statistik, sehingga H1 tidak berhasil didukung oleh data.

Temuan ini didukung oleh statistik deskriptif yang menunjukkan variasi penyaluran ZIS yang tinggi antarprovinsi serta disparitas tingkat kemiskinan yang lebar. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan intervensi komprehensif. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan memerlukan kombinasi pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, pemerataan distribusi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, efektivitas ZIS tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana, tetapi juga kualitas tata kelola lembaga zakat, desain program pemberdayaan, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Siswantoro (2022) yang menyatakan bahwa besarnya dana zakat belum tentu menghasilkan dampak optimal jika tidak didukung oleh tata kelola kelembagaan yang baik. Persoalan utama bukan pada konsep zakat sebagai instrumen redistribusi, melainkan pada efektivitas implementasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayati et al. (2024), efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran distribusi. Selain itu, Efendi (2024) dan Zuchroh (2025) menekankan bahwa transformasi zakat dari pola konsumtif ke produktif

memerlukan kapasitas kelembagaan yang memadai agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa SPBE berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil estimasi menunjukkan koefisien SPBE sebesar -0,1336 dengan probabilitas 0,4812, sehingga tidak signifikan secara statistik dan H2 tidak berhasil didukung oleh data.

Meskipun demikian, arah hubungan negatif tetap sejalan dengan *Digital Governance Theory* yang menjelaskan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kementerian PANRB, 2024; OECD, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan *enabling factor*, bukan faktor yang secara langsung mengurangi kemiskinan.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Aryati et al. (2026) yang menemukan bahwa *digital government* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan World Bank (2023) yang menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan belum tentu secara langsung mengurangi kemiskinan. Dampak transformasi digital lebih banyak muncul melalui peningkatan kualitas institusi, efisiensi belanja publik, dan perbaikan iklim investasi, sehingga hubungannya bersifat tidak langsung (*indirect effect*). Selain itu, UNDP (2023) juga menyoroti adanya *digital divide* antarwilayah yang menyebabkan manfaat SPBE belum dirasakan secara merata.

Peran SPBE dalam Memoderasi Pengaruh Penyaluran ZIS-DSKL terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan variabel interaksi (LZIS × SPBE) memiliki koefisien 0,3134 dengan probabilitas 0,0015 (< 0,05), sehingga SPBE terbukti berperan sebagai variabel moderasi. Namun, arah koefisien interaksi yang positif menunjukkan bahwa SPBE tidak memperkuat pengaruh negatif ZIS–DSKL terhadap kemiskinan, melainkan cenderung melemahkannya.

Temuan ini dapat dijelaskan karena Indeks SPBE mengukur kematangan implementasi pemerintahan digital secara umum, bukan secara khusus digitalisasi pengelolaan *Islamic Social Finance* (Kementerian Nur et al, 2026). Terdapat *institutional mismatch* antara SPBE yang dikembangkan pemerintah daerah dengan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ yang memiliki sistem informasi dan basis data

tersendiri. OECD (2023) menegaskan bahwa *digital government* yang efektif mensyaratkan interoperabilitas data, koordinasi antarlembaga, dan integrasi pelayanan publik. Dengan demikian, transformasi digital pemerintahan melalui SPBE belum cukup untuk meningkatkan efektivitas *Islamic Social Finance* dalam mengurangi kemiskinan tanpa integrasi kelembagaan dan sistem informasi yang memadai.

Pembahasan Variabel Kontrol

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan

IPM memiliki koefisien negatif namun tidak signifikan secara statistik (probabilitas 0,4326). Secara teoritis, hasil ini belum sepenuhnya sejalan dengan *Capability Approach* yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, dampak investasi pendidikan dan kesehatan umumnya bersifat jangka panjang (*long-term effect*) (Todaro & Smith, 2015). Temuan ini sejalan dengan Nabila et al. (2026) dan Wirayudha & Prasetyia. (2024) yang menunjukkan bahwa IPM belum selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat regional karena efektivitas pembangunan manusia dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja dan pemerataan pembangunan.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (probabilitas 0,0016). Hasil ini konsisten dengan teori pembangunan ekonomi Todaro dan Smith (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat penting dalam pengurangan kemiskinan. Peningkatan PDRB per kapita pada provinsi sampel telah mampu menciptakan manfaat ekonomi yang relatif inklusif. Temuan ini konsisten dengan World Bank (2023), OECD (2023), serta Anggara (2026) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan determinan utama dalam pengurangan kemiskinan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan

TPT memiliki koefisien positif sesuai teori namun tidak signifikan secara statistik pada taraf 5% (probabilitas 0,0505). Secara teoritis, hubungan tersebut tidak selalu linier pada tingkat regional karena dipengaruhi sektor informal dan perlindungan sosial. Dominasi sektor informal menyebabkan sebagian masyarakat tetap memperoleh pendapatan meskipun tidak tercatat sebagai pekerja formal. Temuan ini

sejalan dengan Wirayudha & Prasetyia (2026) yang menemukan bahwa pengangguran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat provinsi.

Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Inflasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik (probabilitas 0,7307). Namun, inflasi selama periode penelitian relatif rendah dan berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial pemerintah mampu mengurangi dampak kenaikan harga terhadap kelompok miskin. Temuan ini sejalan dengan Bank Indonesia (2024) dan OECD (2023) yang menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali tidak selalu meningkatkan kemiskinan secara signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Islamic Social Finance* (ISF) yang diproksikan melalui penyaluran ZIS–DSKL terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi di Indonesia periode 2019–2025, dengan Indeks SPBE sebagai variabel moderasi serta IPM, PDRB per kapita, TPT, dan inflasi sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM), diperoleh simpulan berikut.

Penelitian ini menganalisis hubungan *Islamic Social Finance* (ISF) yang diproksikan melalui penyaluran ZIS–DSKL terhadap tingkat kemiskinan pada sepuluh provinsi di Indonesia periode 2019–2025, dengan Indeks SPBE sebagai variabel moderasi serta IPM, PDRB per kapita, TPT, dan inflasi sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil regresi data panel *Random Effect Model* (REM), diperoleh simpulan berikut.

Pertama, pengaruh ZIS-DSKL terhadap kemiskinan bersifat kondisional. Hasil estimasi menunjukkan koefisien utama LZIS bernilai negatif (-0,0786) namun tidak signifikan secara statistik (p=0,7756). Namun, karena terdapat variabel interaksi yang signifikan, koefisien ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai efek universal. Efek marginal ZIS-DSKL terhadap kemiskinan justru bergeser positif pada rentang nilai SPBE yang diamati. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan ZIS-DSKL secara langsung menurunkan kemiskinan tidak dapat diterima secara empiris. Efektivitas ISF sangat bergantung pada konteks tata kelola dan karakteristik sosial-ekonomi daerah.

Kedua, pengaruh SPBE terhadap kemiskinan juga bersifat kondisional. Indeks SPBE tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kemiskinan (p=0,4812). Digitalisasi pemerintahan dalam penelitian ini bertindak sebagai *enabling factor* yang menyediakan

infrastruktur tata kelola, namun dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum terkonfirmasi secara statistik pada taraf 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat SPBE memerlukan waktu (*lag effect*) dan dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Ketiga, SPBE terbukti memoderasi hubungan ZIS-DSKL dan kemiskinan (H3 didukung). Variabel interaksi (LZIS × SPBE) berpengaruh signifikan dengan koefisien positif (0,3134; p=0,0015). Arah koefisien positif ini menunjukkan bahwa peningkatan implementasi SPBE justru mengubah arah hubungan, di mana pada level SPBE yang lebih tinggi, kecenderungan ZIS-DSKL dalam menurunkan kemiskinan melemah. Temuan ini menegaskan adanya *institutional mismatch*; SPBE masih berfokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan umum dan belum terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan zakat (BAZNAS/LAZ), sehingga belum mampu mengoptimalkan penargetan mustahik.

Keempat, dari variabel kontrol, hanya PDRB per kapita yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (p=0,0016). Sementara itu, TPT memiliki koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik pada taraf 5% (p=0,0505). IPM dan inflasi juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam model ini, pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) masih menjadi faktor yang paling konsisten dalam menjelaskan variasi kemiskinan dibandingkan variabel makro lainnya.

Keterbatasan Penelitian

Temuan di atas perlu dipahami dalam batasan metodologis berikut: (1) Sampel terbatas pada 10 provinsi dengan data lengkap (*purposive sampling*), sehingga berpotensi menimbulkan *selection bias* dan belum tentu menggambarkan kondisi seluruh Indonesia; (2) Proksi ZIS-DSKL menggunakan data agregat penyaluran tanpa normalisasi terhadap jumlah penduduk atau jumlah mustahik di masing-masing provinsi; (3) Data penyaluran berpotensi teratribusi pada lokasi kantor pusat lembaga, bukan lokasi mustahik penerima; (4) Indeks SPBE mengukur tata kelola digital pemerintahan secara umum, bukan spesifik digitalisasi zakat; serta (5) Sebagai studi observasional, model REM ini belum sepenuhnya mengatasi potensi *endogeneity*, *reverse causality* (kemiskinan tinggi dapat memicu penyaluran ZIS lebih besar), dan *omitted variables*. Oleh karena itu, simpulan statistik ini bersifat asosiatif, bukan kausal absolut.

Rekomendasi

Secara keseluruhan, optimalisasi *Islamic Social Finance* tidak cukup hanya dengan meningkatkan volume penyaluran dana. Diperlukan

penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta yang paling krusial: **integrasi sistem informasi**. Pemerintah daerah, BAZNAS, dan LAZ perlu membangun interoperabilitas data mustahik yang terpadu di bawah ekosistem SPBE. Dengan integrasi data yang akurat, penyaluran ZIS-DSKL dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan pada akhirnya mampu memperkuat dampaknya terhadap penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

REFERENCES

Anggara, P. G. (2026). Determinasi Ekonomi Utama dalam Penurunan Kemiskinan: Studi Panel 11 Tahun di Indonesia. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, *10*(1), 39-55. https://doi.org/10.31293/rjabm.v10i1.9140

Aryati, J. N., Alamin, T., & Gusti, A. A. (2026). Implementasi Smart Village Berbasis Internet of Things untuk Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Studi Global dan Diplomasi (JSGD)*, *1*(1), 29-37.

BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Puskas BAZNAS. https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024

BPS. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2025*. https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional

BPS. (2021). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*. Badan Pusat Statistik. https://balikpapankota.bps.go.id/id/pressrelease/2022/01/17/792/profil-kemiskinan-di-indonesia-september-2021.html

BPS. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik. https://pasuruankab.bps.go.id/news/2025/11/09/807/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-2025-capai-75-90.html

BPS. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/infographic?id=1113

BPS. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/assets/publication/2025/04/11/95c729ee8c6fb5e2cb86b00f/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html

BPS. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025*. Badan Pusat Statistik. https://share.google/bvHHKZIaWJ2Qts9Ee

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-53953-5_13

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.

BPS. (2026). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2025*. https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Makraja, F., Afifah, N., Fitriyani, E., & Al Fajri, M. (2025). Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(1), 120-133. https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26199

Efendi, N. (2024). Penerapan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Desa Berdaya Di Rumah Zakat Perspektif Hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *2*(2), 1-13. https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972

Gujarati, D. N. (2012). Basic Econometrics 4th ed.

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European business review*, *26*(2), 106..

Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications Ltd.

Haryanti, M. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, *5*(1), 12-29. https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i1.730

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government information quarterly*, *32*(3), 221-236. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X15000775

Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance—Doing more with less. *Government Information Quarterly*, *30*, S1-S8.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X12001517

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian PANRB. https://repository.stiaamuntai.ac.id/id/eprint/566/

Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program industrialisasi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat: Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 288-297. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077

Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 06*(01), 1–17. https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.7347

Manalu, S. P. R., Lubis, H., Nasution, A. H., Pakpahan, E., Hajatina, H., & Bukit, A. N. (2024). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, dan Gini Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022. *VALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Bisnis,* 4(2), 237–253. https://doi.org/10.36490/value.v4i2.1065

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), 101385. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18304131

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

Nabila, S., Nurjanah, S., & Zahra, S. F. (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *2*(1), 813-833. https://doi.org/10.63822/1fv89v21

Nuraila, T., Haryaty, T. D. D., Sumin, S. E., & Syamratun Nurjannah, M. S. I. (2026). PENGARUH DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2014-2024. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal*

Ekonomi dan Perbankan Syariah, *11*(4). https://doi.org/10.30651/jms.v11i4.33118

Nur, A. H., Suhartono, R. M., Putra, L. R. Z., & Hezradian, R. F. (2026). Model Open Government Berbasis Kearifan Lokal Sarapatanguna Sebagai Instrumen Peningkatan Kepatuhan Hukum Pemerintah Kota Baubau: An Open Government Model Based On The Sarapatanguna Local Wisdom As An Instrument To Enhance Legal Compliance In The Baubau City Government. *Journal Presumption of Law*, *8*(2), 213-229. https://doi.org/10.31949/jpl.v8i2.19814

OECD Publishing. (2020). *The OECD digital government policy framework: six dimensions of a digital government*. Paris, France: OECD Publishing..

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital Government Review: Towards a Digital Transformation of the Public Sector*. OECD Publishing.

Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peran Zakat dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3*(3), 175–185. https://doi.org/10.55606/religion.v3i3.1000

Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research methods for business: A skill building approach*. john wiley & sons..

Sen, A., & Sen, A. (1999). *Development as freedom* (Vol. 6). Oxford: Oxford university press..

Siswantoro, S. (2022). Can the integration between Islamic social finance and Islamic commercial finance tackle poverty in Indonesia?. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 236-249..

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syamsuddin, H. M. (2011). Perhitungan indeks Gini ratio dan analisis kesenjangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *6*(4). https://doi.org/10.22437/paradigma.v0iOktober.144

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th).

Utami, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan terhadap Indeks Gini di Indonesia. *Medical Technology and Public Health Journal, 4*(2), 212–223. https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i2.806

Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *2*(1), 43-62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508

Wirayudha, A. B., & Prasetyia, F. (2024). Analisis determinan kemiskinan di 34 provinsi di indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, *3*(3), 763-779. https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.08

Wooldridge, J. M. (2002). Introductory econometrics: a modern approach. *Language*, *27*(863p), 24cm..

World Bank. (2023). *Digital progress and trends report 2023*. World Bank.

World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. World Bank.

Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 3067-3073. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387